



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2008**



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2008 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- (2) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.
 - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2008.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008
- BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
- BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB V MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
- BAB VI PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2008 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2008.

Pasal 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal : 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 28 SERI D



WALIKOTA YOGYAKARTA

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
BAB II.	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2007	4
BAB III.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN DAERAH	46
BAB IV.	KAIDAH PELAKSANAAN	59
BAB V.	MATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2007	61
BAB VI.	PENUTUP	113

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 27 TAHUN 2007
TANGGAL : 31 MEI 2007

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007–2011, dan merupakan kelanjutan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2007. Penyusunan RKPD tahun 2008 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, maka penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD. Di dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 ditetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu :

1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan dukungan SDM unggul.
2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman obyek dan daya tarik wisata.
3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta masyarakat.

Ketiga sasaran tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pelaksanaan satu sasaran akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan sasaran lainnya. Dengan

mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan tematik pembangunan lima tahun sebelumnya dan tematik tahun 2007, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi maka perlu ditetapkan tema pembangunan tahun 2008 yang merupakan titik berat pelaksanaan pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada dan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan yang disebut dengan Rencana Aksi Daerah yang dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran pembangunan tahun 2008.

RKPD Tahun 2008 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang pelaksanaannya diarahkan untuk melaksanakan tematik tahun 2008 yaitu "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya Dengan Keragaman Atraksi Dan Daya Tarik Wisata" dan memantapkan tematik pembangunan tahun 2007 yaitu "Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana permukiman, perkotaan, pelayanan publik dan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat". Selain itu pelaksanaan pembangunan tahun 2008 juga untuk mempersiapkan tematik pembangunan tahun 2009 "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional".

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2008 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai dengan pagu indikatif pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian kedudukan RKPD Tahun 2008 merupakan:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam

rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008.

- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2008.
- c. Acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008

A. KONDISI UMUM

1. Pencapaian Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2007

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2008 telah dimulai sejak awal tahun 2007 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2008 diperlukan dukungan hasil pembangunan tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007. Hasil pencapaian pembangunan tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007 sebagai berikut.

a. Pengembangan pariwisata berbasis budaya

Kepariwisata di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Titik berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis), khususnya budaya kraton dan budaya jawa. Walaupun pariwisata berbasis budaya sudah relatif optimal dikembangkan tetapi pada tahun 2006 jumlah dan lama tinggal wisatawan mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut disebabkan adanya bencana gempa bumi pada pertengahan tahun 2006 dan adanya rasa kekhawatiran atas keamanan saat berkunjung di Indonesia yang juga berimbas pada Kota Yogyakarta, terutama bagi wisatawan asing. Jumlah wisatawan pada tahun 2006 sebanyak 715.210 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 654.502 orang, dan wisatawan mancanegara sebanyak 60.708 orang, dengan lama tinggal rata-rata 1,38 hari. Untuk mengembangkan

kepariwisataan diperlukan konsepsi dan sinergi pada masing-masing stakeholder. Dari sisi konsepsi, dengan berbagai sumber daya yang relatif lebih baik, Kota Yogyakarta sudah memiliki berbagai konsep yang komprehensif dan didukung oleh *stakeholder* pariwisata. Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2006, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat diperkirakan kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara diperkirakan sebanyak 1.072.168 orang, dengan lama tinggal rata-rata 2,34 hari.

b. Pendidikan berkualitas

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan secara normatif mempunyai daya tampung yang cukup bagi warga Kota Yogyakarta untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi pada kegiatan belajar mengajar di sebagian sekolah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kualitas sarana dan prasarana masih kurang memadai. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada empat ukuran/indikator, yaitu (1) mutu produk/lulusan, (2) mutu proses pembelajaran, (3) mutu layanan sekolah dan (4) mutu lingkungan sekolah serta (5) kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (*life skills*). Mutu produk/lulusan pendidikan dapat dinilai berdasarkan nilai ujian akhir yang tinggi. Tetapi tentunya nilai bukan satu-satunya ukuran, harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga mempunyai, yang dapat dimanfaatkan untuk bekal hidup peserta didik di masyarakat. Selain itu tentunya lulusan pendidikan juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yang responsi terhadap persoalan sosial yang ada. Mutu proses pembelajaran sangat ditentukan pada profesionalisme guru. Guru dalam pembelajaran tidak hanya

mengajarkan ilmu pengetahuan semata tetapi juga mendidik, mengarahkan dan menggerakkan siswa agar menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Mutu layanan sekolah yang baik tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah dan lain sebagainya. Mutu layanan juga ditentukan dari kemampuan pelaku sekolah untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sekolah yang bersih, indah dan damai. Dengan lingkungan yang baik akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerataan kualitas pendidikan perlu untuk segera ditangani. Untuk mendukung pendidikan anak usia dini mulai dirintis penyelenggaraan PAUD di beberapa RW. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat pada tahun 2007 diharapkan pemerataan kualitas pendidikan akan semakin meningkat.

Pada tahun 2006 jumlah anak putus sekolah sebanyak 349 orang dan pada tahun 2007 diprediksikan menurun menjadi 342 orang. Pada tahun 2007 melalui program sertifikasi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas guru meningkat 18%. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2006 sebesar 99,6% dan pada tahun 2007 diprediksikan naik menjadi sebesar 99,7%. Pada tahun 2006 cakupan pemberian jaminan pendidikan daerah sudah mencapai 99% dari anak sekolah yang tidak mampu. Sedangkan dari sisi komponen standar biaya pendidikan, besaran jaminan pendidikan daerah sudah dapat memenuhi 90%. Pada tahun 2007 diperkirakan cakupan pemberian jaminan pendidikan daerah untuk anak sekolah tidak mampu sebesar 100%, sedangkan dari sisi komponen standar biaya pendidikan, besaran jaminan pendidikan daerah mendekati 100%.

c. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2006 belum sesuai dengan target yang diharapkan akibat kenaikan harga BBM dan bencana gempa bumi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sebesar 4,13 % dan pada tahun 2007 diprediksi naik menjadi 5,13%. Tingkat inflasi pada tahun 2006 sebesar 10,40% dan diprediksikan pada tahun 2007 menurun menjadi 9,92%. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2006 sebesar Rp 4.620.165.000.000,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 4.857.180.000.000,-, sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2006 sebesar Rp 10.412.618,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 10.724.997.-

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain Pendapatan yang sah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Meskipun terjadi bencana alam gempa bumi pada pertengahan tahun 2006, namun dengan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan pada tahun 2007 Pendapatan Daerah dapat meningkat. Pendapatan Daerah pada tahun 2006 sebesar Rp 519.154.713.652,- dan diprediksikan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp 571.751.665.000,-.

d. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Bencana alam gempa bumi tahun 2006 telah mengakibatkan rusaknya rumah penduduk dan fasilitas produksi yang juga diikuti dengan adanya kenaikan harga bahan pokok pangan. Hal

tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan pemberian jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana perkotaan dan peningkatan investasi. Pemberian jaminan sosial diberikan kepada masyarakat miskin, sedangkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana perkotaan dan peningkatan investasi dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan. Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin kejelasan hak masing-masing pihak, selain itu perijinan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi. Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik, sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan vertikal dalam skala besar sehingga dapat mengganggu iklim investasi. Kondisi tersebut perlu dijaga bersama dengan seluruh *stakeholder*.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, pada tahun 2007 diprediksikan angka kemiskinan dan pengangguran akan menurun. Penduduk miskin yang berdomisili di Kota Yogyakarta pada tahun 2006 berjumlah 86.055 orang, sedangkan berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 81/KEP/2007 Tahun 2007 jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2007 sebesar 65.456 orang. Sampai dengan akhir tahun 2007 penduduk miskin

diprediksikan menurun menjadi 58.910 orang. Pengangguran pada tahun 2006 berjumlah 31.884 orang diprediksikan pada tahun 2007 menurun menjadi 30.728 orang.

e. Perwujudan Kota Sehat

Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pengertian sehat disini meliputi kesehatan jasmani, rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu indikator budaya bersih adalah angka bebas jentik minimal 95 %, pada tahun 2006 hasil yang dicapai baru 77,9 %. Disisi lain, capaian angka kematian bayi 7,62 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan 61,7 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun umur harapan hidup laki-laki adalah 66,38 tahun dan perempuan 70,25 tahun. Pada tahun 2007 diprediksikan angka bebas jentik naik menjadi 85%, capaian angka kematian bayi turun menjadi 3,7 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan dipertahankan tetap sebesar 61,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan umur harapan hidup laki-laki diperkirakan tetap 66,38 tahun dan perempuan 70,25 tahun.

f. Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme

Meskipun pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terus dilakukan, namun menurut penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi

dan nepotisme akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan pakta integritas tersebut diharapkan semakin berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi pemerintah, serta meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efisien dan efektif.

Setelah penandatanganan pakta integritas tersebut akan segera diikuti dengan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan KKN. Dengan penandatanganan pakta integritas dan penyusunan rencana aksi daerah serta meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan diharapkan indikator yang menunjukkan adanya KKN pada tahun 2007 semakin berkurang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 terdapat 105 temuan dan pada tahun 2007 diprediksikan terjadi penurunan.

g. Pelaksanaan Reformasi birokrasi

Dalam upaya menuju terwujudnya *good governance* faktor penting yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang memuaskan, aparaturnya pemerintah yang kompeten dan profesional serta sistem yang lebih komprehensif. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berjalan baik didukung

dengan jumlah dan kualifikasi pendidikan personil, sarana dan prasarana yang memadai serta penataan kelembagaan.

Dibidang pelayanan catatan sipil dan kependudukan telah diterapkan kontrak pelayanan (*citizen charter*). Di bidang pelayanan perijinan telah dibentuk Dinas Perijinan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan ijin. Pada tahun 2006 jenis perijinan yang dilayani oleh Dinas Perijinan adalah 34 jenis. Dari 34 jenis perijinan tersebut yang didukung dengan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta baru sejumlah 15 jenis. Pada tahun 2007 jumlah Peraturan Daerah yang menjadi landasan pelaksanaan perijinan diperkirakan bertambah menjadi 17 jenis.

Penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan *performance* birokrasi, sehingga reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

h. Pembangunan sarana dan prasarana berkualitas

Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Yogyakarta pada pertengahan tahun 2006 mempengaruhi kondisi perumahan dan fasilitas umum di Kota Yogyakarta. Pada akhir tahun 2006 sebagian infrastruktur perkotaan seperti jalan dan jembatan, serta gedung perkantoran, sekolah dan puskesmas yang mengalami kerusakan, sudah dibangun dan berfungsi kembali meskipun belum optimal. Melalui dana rehabilitasi dan rekontruksi dari APBN pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007 telah direhabilitasi rumah penduduk yang roboh dan rusak berat. Beberapa fasilitas transportasi antara lain APILL, marka dan rambu telah direhabilitasi sehingga dapat berfungsi lebih optimal. Peningkatan lingkungan permukiman melalui perbaikan prasarana dasar permukiman telah dilaksanakan melalui fasilitasi pemugaran rumah, perbaikan kamar mandi dan wc umum, perbaikan gedung pertemuan warga, penerangan jalan kampung

dan pembangunan IPAL komunal. Untuk mendukung aktifitas masyarakat di tingkat wilayah, juga telah dibebaskan beberapa bidang tanah yang kemudian dikelola oleh masyarakat. Berbagai upaya tersebut akan lebih dioptimalkan pada tahun 2007 sehingga diproyeksikan sarana dan prasarana akan semakin meningkat kualitasnya.

i. Peningkatan kualitas lingkungan

Peningkatan kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor telah mengakibatkan tingginya polusi udara di Kota Yogyakarta. Untuk memperbaiki kualitas udara diupayakan melalui pembangunan taman-taman kota, ruang terbuka hijau. Untuk memperindah wajah kota telah diupayakan melalui penerangan jalan umum dan lampu-lampu hias. Dengan tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku, Wujudkan Nyata" berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah. Dengan berbagai program dan kegiatan tersebut luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 26,8% dari luas wilayah. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2007 luas RTH tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga tingkat polusi semakin berkurang dan meningkatnya kualitas lingkungan.

j. Pengurangan risiko bencana

Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah bencana gempa bumi. Upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi melalui mitigasi bencana gempa bumi perlu dilakukan. Aspek penting dalam mitigasi dampak bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum, pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif dan sistem dan

prosedur penanganan bencana. Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif, sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan.

2. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2008

1. Pengembangan pariwisata berbasis budaya

Kepariwisataan pada tahun 2006 menurun jika dibandingkan tahun 2005. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya bencana alam gempa bumi dan belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya. Dengan berbagai capaian pelaksanaan penanganan pasca gempa tahun 2006 disertai perkiraan target jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal (*length of stay*) tahun 2007, masalah utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tahun 2008 adalah :

- a. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan *Yogya Berhati Nyaman*
- c. Masih kurangnya promosi pariwisata yang tepat sasaran dan kurangnya koordinasi dalam berpromosi dengan pemangku kepentingan khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota serta pelaku pariwisata.
- d. Masih kurangnya pengembangan seni yang dapat mendukung pariwisata
- e. Pertunjukan seni dan budaya yang belum optimal sehingga belum menjadi daya tarik wisatawan
- f. Belum optimalnya pembangunan jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kepariwisataan

- g. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata, antara lain :
- bercampurnya berbagai moda angkutan dalam satu jalur sehingga tidak tertibnya arus lalu lintas
 - masih adanya gelandangan, pengemis dan anak jalan yang berada di obyek wisata dan tempat strategis lainnya
 - belum seluruh tempat wisata dan pusat keramaian dilengkapi dengan prasarana kebersihan
 - beberapa tarif angkutan penumpang yang tidak seragam dan pasti
 - di beberapa kawasan, penghijauan dan penerangan jalan umum belum dapat ditangani secara optimal

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. Menyusun strategi promosi sesuai segmentasi pasar wisatawan.
- b. Melakukan promosi untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi
- c. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya
- d. Menciptakan diversifikasi produk wisata.
- e. Melestarikan budaya Jawa yang selaras dengan sejarah, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- f. Mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengembalikan kapasitas usahanya.
- g. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona.
- h. Menyusun *calendar of event* seni dan budaya secara periodik.
- i. Membangun jaringan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
- j. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata

2. Belum optimalnya pengembangan pendidikan berkualitas

Pada tahun 2005 angka putus sekolah sebanyak 411 orang dan pada tahun 2006 berkurang menjadi 349 orang, sehingga angka tersebut masih relatif besar. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit, dengan demikian permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a. masih adanya angka putus sekolah.
- b. kesenjangan mutu antar sekolah.
- c. belum optimalnya pembelajaran masyarakat.
- d. belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
- e. belum semua guru memiliki sertifikat profesi.
- f. belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif.
- g. belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas.

Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. pemerataan akses pendidikan
- b. meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan
- c. meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ, EQ, dan SQ
- d. meningkatkan sarana prasarana sekolah dan sertifikasi guru serta akreditasi sekolah.
- e. menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat.
- f. meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling.
- g. menciptakan suasana pendidikan yang mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan.

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2005, dari 4,88% tahun 2005 menjadi 4,67% tahun 2006, mengakibatkan belum optimalnya investasi dan daya saing produk. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2007 karena dampak dari bencana alam gempa bumi.

Belum optimalnya pertumbuhan dan perekonomian daerah Kota Yogyakarta disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara normal pasca bencana alam gempa bumi
- b. belum optimalnya database tentang potensi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
- c. masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta
- d. masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah
- e. belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif
- f. belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor riil dan UMKMK
- g. masih rendahnya akses permodalan bagi UMKMK

Kondisi perekonomian yang menurun tersebut juga mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga belum sepenuhnya potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Pada Tahun Anggaran 2006 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 96.551.932.635,- sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan sebesar Rp 100.374.387.000,-. Pendapatan tersebut masih dimungkinkan untuk ditingkatkan, sehingga akan semakin mendekati dengan potensi yang dimiliki. Selain mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah juga dapat ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada

masyarakat/swasta untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dengan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. mengembangkan perdagangan dan industri, khususnya sektor UMKMK
- b. merumuskan regulasi dan perijinan yang dapat mendorong masyarakat/swasta dalam meningkatkan perekonomian
- c. menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- d. mengembangkan etika bisnis bagi pengusaha UMKMK
- e. menjalin kemitraan dengan dunia usaha.

4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya teratasi sebagai akibat krisis ekonomi, khususnya pada sektor riil. Kondisi tersebut lebih diperburuk dengan kenaikan harga 9 bahan pokok khususnya pertengahan tahun 2007. Kenaikan tersebut mengakibatkan biaya produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan tingginya angka kemiskinan. Permasalahan lain yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. kerugian yang disebabkan oleh bencana gempa bumi terutama ditanggung oleh sektor swasta, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan penambahan kesempatan kerja
- b. belum optimalnya investasi asing dan dalam negeri yang masuk di Kota Yogyakarta, sehingga pengangguran belum dapat terserap
- c. belum pulihnya sektor riil, sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

- d. kenaikan harga-harga bahan produksi juga mengakibatkan kenaikan biaya produksi, untuk tetap dapat mempertahankan harga jual produk yang tetap kompetitif salah satu upaya adalah mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang tersedia
- e. kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kebutuhannya, mengakibatkan tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sehingga taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.
- f. besarnya jumlah keluarga yang menjadi tanggungan

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebesar 67.226 orang dan angka pengangguran 26.864 orang. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin yang berdomisili di Kota Yogyakarta sebesar 86.055 orang, sedangkan berdasarkan pendataan ulang jumlah penduduk miskin sebesar 65.456 orang. Pada tahun 2006 angka pengangguran menjadi 31.884 orang. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin
- b. menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik calon investor
- c. mengendalikan kenaikan harga 9 kebutuhan pokok dengan operasi pasar
- d. meningkatkan kesempatan kerja, produktifitas pekerja, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
- e. mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat
- f. meningkatkan akses permodalan, khususnya sektor riil

5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan

Kondisi derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator antara lain: pada tahun 2005 angka kematian bayi 3,57 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 4,9 per 1000 kelahiran hidup. Adapun angka

kematian ibu melahirkan pada tahun 2005 sebesar 141 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2006 angka kematian ibu melahirkan menjadi 164,41 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya angka usia harapan hidup laki-laki 66,38 tahun dan perempuan 70,25 tahun. Di samping itu masih adanya permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya yaitu :

- a. Persentase balita dengan status gizi buruk masih relatif tinggi
- b. angka kematian bayi masih relatif tinggi
- c. kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah
- d. ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi
- e. partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif rendah
- f. belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
- g. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan

Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. peningkatan, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan
 - b. peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
 - c. penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan balita
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha boga.
6. Belum optimalnya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih)

Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dilaksanakan secara intensif namun hasilnya masih belum optimal.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- a. adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang
- b. belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat
- c. masih rendahnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum
- d. masih rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. penegakan hukum dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN dan mewujudkan clean government.
- c. melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai

7. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, kendati demikian hasilnya masih belum optimal.

Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi disebabkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur
- b. belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan standar pelayanan minimal
- c. belum optimalnya penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. pembenahan manajemen kepegawaian
- c. penerapan pemberian penghargaan dan hukuman serta pembinaan pegawai.

8. Menurunnya kualitas sarana prasarana

Pasca Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006 lalu berdampak pada kerusakan sarana dan prasarana belum terselesainya pembangunan kembali sarana prasarana tersebut masih merupakan permasalahan. Sehingga permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2008 adalah :

- a. kerusakan sarana dan prasarana perkotaan meliputi jaringan air bersih, sanitasi perkotaan, permukiman dan perumahan, jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum sepenuhnya terbangun kembali.
- b. masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan ;
- c. belum tertatanya sistem transportasi yang baik.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:

- a. penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.
- c. meningkatkan sistem transportasi perkotaan

9. Menurunnya kualitas lingkungan

Kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa

depan. Permasalahan lingkungan hidup yang masih dihadapi adalah :

- a. Tingginya polusi udara.
- b. belum optimalnya pengelolaan sampah.
- c. belum meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat .
- d. kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. memperluas ruang terbuka hijau dan ruang publik.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan sampah.
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana perkotaan.

10. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam

Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat, sehingga dalam tahun 2007 ini masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Berbagai upaya penanganan bencana alam belum dapat menuntaskan dampak dari bencana alam.
- b. belum terumuskannya mitigasi bencana secara jelas

Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah

- a. penuntasan dampak bencana terhadap sarana dan prasarana perkotaan.
- b. mengembangkan manajemen bencana berbasis masyarakat sehingga mampu meminimalkan dampak bencana.

B. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Kota Yogyakarta dengan predikat Kota Pendidikan, Pariwisata, Budaya, Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Propinsi DIY serta keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa menjadi daya tarik bagi daerah sekitar dan juga daerah lainnya di Indonesia. Predikat tersebut menjadikan sektor pariwisata dan pendidikan sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah. Di samping itu nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta semakin memperkuat predikat tersebut.

Melihat posisi kota Yogyakarta yang berada hampir tepat di tengah wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan modal positif bagi perkembangan pariwisata daerah kabupaten / kota di sekitarnya. Yogyakarta sebagai daerah kunjungan wisata kedua setelah Bali cukup menjadi magnet wisatawan bagi domestik maupun mancanegara. Diharapkan akan dapat memberikan *multiplier effect* bagi penduduk Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta pada tahun 2008 akan mengandalkan potensi pariwisata yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya telah menghasilkan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat khususnya pada bidang kepariwisataan sehingga dapat menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta secara *signifikan*. Proporsi sumbangan pendapatan dari sektor kepariwisataan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar sehingga berpengaruh kuat terhadap kapasitas keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2008 maka tema pembangunan dan pelaksanaan tahun ke dua RPJMD adalah "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya Dengan Keragaman Atraksi Dan Daya Tarik Wisata".

Makna "Pariwisata Berbasis Budaya" adalah kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta menyempurnakan dan

meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak dan daerah lain. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan terobosan baru yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan dan wisata belanja, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Makna "Keragaman Atraksi dan daya Tarik Wisata" adalah bahwa pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta yang didasarkan pada budaya perlu didukung dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata. Keragaman tersebut antara lain wisata belanja, wisata konvensi, wisata minat khusus, dan wisata pendidikan. Keragaman atraksi dan daya tarik wisata mengandung makna pula tuntutan untuk selalu kreatif dan kompetitif dari seluruh perilaku wisata untuk selalu mengembangkan potensi dan menangkap peluang pasar yang kadang-kadang dinamis.

Penjabaran dan implementasi tema pembangunan Tahun 2008 dituangkan dalam prioritas pembangunan di bawah ini.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 ditetapkan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja;
2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;

8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2008 disusun dalam rangkaian logis Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan. Mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas serta mengacu kepada prioritas pembangunan, maka program dan kegiatan dalam RKPD perlu mendapat dukungan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah propinsi dan pusat.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat strategis dan penting. Rangkuman program dan kegiatan tersebut merupakan Rencana Aksi Daerah yang menjadi prioritas pembangunan Kota Yogyakarta. Rencana Aksi Daerah dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder demi menjamin kelancaran dan kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan harus dihadapi pada tahun 2008, maka prioritas pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata berbasis budaya
2. Meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
5. Meningkatkan upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
6. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik.
8. Pembangunan sarana dan prasarana dan berkualitas
9. Peningkatan kualitas lingkungan

10. Pengurangan risiko bencana

Apabila dihubungkan dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2008, maka 10 (sepuluh) prioritas tersebut saling melengkapi. Prioritas nasional peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja dituangkan dalam prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dan prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Prioritas nasional revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan dituangkan dalam prioritas meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Prioritas nasional percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi dituangkan dalam prioritas pembangunan sarana dan prasarana berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Prioritas nasional peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan dan kesehatan dituangkan dalam prioritas pendidikan berkualitas dan kota sehat. Prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Prioritas nasional pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam prioritas pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik. Prioritas penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, secara sepintas disinggung dalam prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Prioritas nasional penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular dituangkan dalam prioritas pengurangan resiko bencana, mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat serta pembangunan sarana prasarana berkualitas.

Prioritas Pembangunan tahun 2008 tersebut di atas dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Rencana Aksi Daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya.

Tujuan rencana aksi daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yaitu :

- a. Meningkatkan peran pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakat
- b. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya yang berbasis pada budaya lokal
- c. Meningkatkan jumlah dan lama tinggal kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara
- d. Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional
- e. Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi
- f. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.
- b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan / akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan sasaran yaitu meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.072.168 orang menjadi 1.429.126 orang dan lama tinggal dari 2,34 hari menjadi 2,38 hari
- b. Program pengembangan dan pelestarian seni dan budaya dengan sasaran yaitu meningkatkan jumlah kekayaan budaya

yang terkelola dengan baik dari 135 menjadi 158 kekayaan budaya.

- c. Program perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%
- d. Program pengembangan komunikasi dan informasi dan media masa dengan sasaran yaitu meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- e. Program perbaikan / pemeliharaan penerangan jalan umum dengan sasaran yaitu meningkatnya penerangan jalan umum dari 7000 titik menjadi 9000 titik
- f. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 85%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 21.727.757.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 17.127.757.000,- APBD Propinsi DIY Rp 2.000.000.000,- APBN Rp 2.000.000.000,- dan Swasta sebesar Rp 600.000.000,-.

2. Meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas

Tujuan rencana aksi daerah Meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :

- a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau
- b. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tingkat Rukun Warga (RW)
- c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru
- d. Mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual
- e. Memperluas jangkauan dalam pembelajaran masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.
- b. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual
- c. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek : lulusan, proses, manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik, tenaga kependidikan, akreditasi sekolah, standarisasi sarana prasarana dengan sasaran yaitu meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 15% menjadi 33%, meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 76% menjadi 82%, meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 76% menjadi 82% dan Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 56% menjadi 62%
- b. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dari 88% menjadi 91%
- c. Program pengkajian dan pengembangan mutu pendidikan dengan sasaran yaitu diperolehnya baku mutu diatas rata-rata 2% menjadi 4%
- d. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%
- e. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan sasaran yaitu berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%
- f. Program pembinaan dan pengembangan generasi muda dengan sasaran yaitu meningkatnya aktifitas pemuda dari 4% menjadi 8%

- g. Program fasilitasi olah raga dengan sasaran yaitu meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dari 4% menjadi 8%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 91.642.673.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 30.798.090.000, APBD Propinsi DIY Rp 16.001.700.000, APBN Rp 43.742.883.000,- dan Swasta sebesar Rp 1.100.000.000,-.

3. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah

Tujuan rencana aksi daerah Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yaitu :

- a. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha
- c. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau
- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian
- f. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi
- g. Mengurangi jumlah pelanggaran serta meningkatkan PAD
- h. Memfasilitasi kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan jasa
- i. Menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku
- j. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi
- k. Meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

- b. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi.
- c. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan adalah

- a. Program peningkatan pelayanan perijinan dengan sasaran yaitu kesesuaian dengan standar perijinan dari 76 % menjadi 82% dan ketersediaan regulasi perijinan dari 48% menjadi 56%
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKMK dengan sasaran yaitu meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.106 Milyar menjadi 112 Milyar
- c. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan sasaran yaitu penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63 % menjadi 68%
- d. Program peningkatan perdagangan dengan sasaran yaitu meningkatnya barang yang dijual dari 69% menjadi 73%
- e. Program peningkatan kesejahteraan petani perkotaan dengan sasaran yaitu peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelas menjadi 111 kelas, terdiri: utama yaitu dari 2 kelas menjadi 3 kelas, kelas madya dari 10 kelas menjadi 14 kelas, kelas lanjut dari 27 kelas menjadi 7 kelas, kelas pemula dari 70 kelas menjadi 67 kelas
- f. Program peningkatan mutu bahan pangan dengan sasaran yaitu peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 40 unit menjadi 48 unit
- g. Program pengembangan pengelolaan pasar dengan sasaran yaitu ketertiban dari 82% menjadi 84%, keamanan dari 87% menjadi 89% dan kebersihan dari 30% menjadi 28%
- h. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dengan sasaran yaitu menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%
- i. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan secara proyustisi dari 86% menjadi 87%

- j. Program perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 80% menjadi 83%
- k. Program peningkatan kualitas kebijakan pengembangan perekonomian dan pendapatan daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74% menjadi 78%
- l. Program peningkatan dan pengembangan pajak daerah dan pajak pusat yang dipungut melalui daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari 2% menjadi 4% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak dari 0,5% menjadi 1%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 26.507.152.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 16.426.852.000,- APBD Propinsi DIY Rp 400.000.000,- APBN Rp 8.680.300.000 dan Swasta sebesar Rp 1.000.000.000,-.

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan rencana aksi daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu :

- a. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran
- b. Mengurangi jumlah penduduk miskin
- c. Mengurangi tingkat pengangguran
- d. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata
- e. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat
- f. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun bagi penduduk miskin
- g. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas
- h. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan akses penduduk miskin kepada pelayanan dasar
- b. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin
- c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan adalah

- a. Program wajib belajar 12 tahun dengan sasaran yaitu meningkatnya angka partisipasi sekolah dari 99,7% menjadi 99,8% untuk usia sekolah dari SD, SMP, SMA /SMK (APS SD 99,50%, APS SMP 99,85%, APS SMA 99,46% dan APS SMK 99,63%) dan meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 97% untuk warga kota yang tidak mampu (untuk tingkat SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA / SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen masih mendekati 100%).
- b. Program pengembangan jaminan kesehatan masyarakat dengan sasaran yaitu meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 42% menjadi 47%
- c. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan sasaran yaitu meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih 5,03% menjadi 6,53%
- d. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan sasaran yaitu menurunnya jumlah penganggur dari 6,08% menjadi 6%
- e. Program peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, lansia dan difabel serta pengarusutamaan gender dengan sasaran yaitu meningkatnya fasilitas inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak 44% menjadi 48%

- f. Program pemberdayaan kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial dengan sasaran yaitu meningkatnya PSKS sebesar 2%
- g. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan sasaran yaitu menurunnya PMKS sebesar 2%
- h. Program fasilitasi dan inisiasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran yaitu terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 56% menjadi 62%
- i. Program keluarga berencana dengan sasaran yaitu terkendalinya / penurunan angka kelahiran dari CBR 15 menjadi 14
- j. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKMK dengan sasaran yaitu meningkatnya omzet UMKMK dari 106 Milyar menjadi 112 Milyar
- k. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%
- l. Program pengelolaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan prasarana dasar pemukiman dari 10 % menjadi 12,5% dan jumlah rumah layak huni meningkat dari 90% menjadi 92%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 55.480.314.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 41.437.695.000,- APBD Propinsi DIY Rp 5.308.181.000,- APBN Rp 8.634.439.000 dan Swasta sebesar Rp 100.000.000,-.

5. Meningkatkan upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

Tujuan rencana aksi daerah mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah :

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
- b. Mengurangi angka kematian bayi dan balita
- c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan
- d. Mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk penderita kanker pada perempuan miskin
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- f. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju universal coverage
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan puskesmas yang didukung pelayanan prima.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan), surveillance serta monitoring kesehatan.
- b. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program upaya pelayanan kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 72% menjadi 74%
- b. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 41% menjadi 47%
- c. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan sasaran yaitu berkurangnya ancaman / terkendalnya penyakit potensi wabah sebesar 6%

- d. Program pengembangan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit dengan sasaran yaitu meningkatnya indek kepuasan layanan masyarakat dari 0,72 menjadi 0,74
- e. Program regulasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan dengan sasaran yaitu meningkatnya sarana, tenaga perijinan sesuai dengan standar dan mutu dari 48% menjadi 56%
- f. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran yaitu : meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%
- g. Program peningkatan mutu bahan pangan dengan sasaran yaitu peningkatan standar sanitasi higyene unit usaha dari 38 unit menjadi 44 unit

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Meningkatkan upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 54.895.775.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 38.664.990.000, APBD Propinsi DIY Rp 1.177.455.000 dan APBN Rp 17.053.329.000,-.

6. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih

Tujuan rencana aksi daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yaitu :

- a. Meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;
- d. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur;
- e. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- f. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme
- c. Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur
- d. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program peningkatan kualitas produk hukum daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 79% menjadi 83%
- b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%
- c. Program peningkatan pelayanan hukum dengan sasaran yaitu penanganan sengketa / perkara hukum, permasalahan hukum dari 80% menjadi 85% dan penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 84% menjadi 88%
- d. Program peningkatan sistem pengawasan internal dengan sasaran yaitu menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 9% menjadi 8%
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 83 menjadi 86

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 6.286.145.000,- yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Tujuan rencana aksi daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu :

- a. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran
- d. Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan
- e. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur kerja
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
- g. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik.
- b. Mengoptimalkan pengelolaan teknologi Informasi, sumber daya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.
- c. Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.
- e. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif
- f. Meningkatkan manajemen pembangunan yang responsif gender.
- g. Mewujudkan sistem dan prosedur sesuai kebutuhan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program administrasi perkantoran dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%
- b. Program pengembangan manajemen kepegawaian dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operakting prosedur dari 72% menjadi 74%

- c. Program fasilitasi penyelenggaraan Pilkada / Pemilu dengan sasaran yaitu tingkat kesiapan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sebesar 40%
- d. Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 74% menjadi 78%
- e. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan dari 81% menjadi 85%
- f. Program peningkatan administrasi dan pengelolaan barang daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 83% menjadi 86%
- g. Program peningkatan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%
- h. Program pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%
- i. Program pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa dengan sasaran yaitu meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- j. Program pengembangan kerjasama daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 72 % menjadi 74%
- k. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dengan sasaran yaitu meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%
- l. Program pemeliharaan rutin dan berkala sarana prasarana kearsipan dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 81% menjadi 82%
- m. Program pengembangan data dan informasi dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan

- perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 83% menjadi 85%
- n. Program peningkatan pelayanan kerumahtanggaan, keuangan dan administrasi Pemkot dengan sasaran yaitu meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Sekda serta pelayanan rumah tangga pemerintah kota dari 83% menjadi 86%
 - o. Program penataan administrasi kependudukan dengan sasaran yaitu meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 67 % menjadi 75%
 - p. Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan dengan sasaran yaitu meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 62% menjadi 64%
 - q. Program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 82% menjadi 84%
 - r. Program peningkatan layanan pada DPRD dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 83% menjadi 86%
 - s. Program peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dengan sasaran yaitu perwujudnya kelembagaan LPMK, RT,RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 64% menjadi 68%
 - t. Program perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%
 - u. Program penelitian dan pengembangan dengan sasaran yaitu peningkatan cakupan / terkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 82% menjadi 84%
 - v. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu meningkatnya kesesuaian SOP / standar pelaksanaan kegiatan dari 83% menjadi 86%

- w. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya penilaian BPK Wajar dari 86% menjadi 87%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 118.441.958.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 104.696.304.000,- APBD Propinsi DIY Rp 3.000.000.000, APBN Rp 10.245.654.000,- dan Swasta sebesar Rp 500.000.000,

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Tujuan rencana aksi daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yaitu :

- a. Memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar publik
- b. Tertatanya kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- c. Memudahkan masyarakat mempergunakan sarana prasarana publik
- d. Meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta terhadap pembangunan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar publik perkotaan yang memadai bekerjasama dengan daerah tetangga khususnya melalui Sekretariat Bersama Kartomantul
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta.

- b. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- c. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
- d. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan detail tataruang kawasan dan rencana rinci kawasan dengan sasaran yaitu meningkatnya produk rencana detail tataruang dan rencana rinci dari 33% menjadi 50%
- b. Program rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan sasaran yaitu meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 5% menjadi 9%
- c. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dengan sasaran yaitu meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 66% menjadi 72%
- d. Program peningkatan pelayanan angkutan dengan sasaran yaitu peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 66% menjadi 72%
- e. Program peningkatan pengaturan lalu lintas dengan sasaran yaitu meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 66% menjadi 72%
- f. Program pengelolaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan dan pengembangan perumahan dan permukiman dengan sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dari 10% menjadi 12% dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%
- g. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan sasaran yaitu meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 66% menjadi 72%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 90.217.108.000,- bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 16.900.012.000,- APBD Propinsi DIY Rp 13.836.000.000,- APBN Rp 58.881.096.000,- dan Swasta sebesar Rp 600.000.000,-.

9. Peningkatkan Kualitas Lingkungan

Tujuan rencana aksi daerah Peningkatkan Kualitas Lingkungan yaitu :

- a. Memperbaiki kualitas lingkungan
- b. Meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku lingkungan
- c. Menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau
- d. Menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan
- f. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan
- g. Mengendalikan pencemaran.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
- b. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
- c. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal dalam proses pembangunan

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan sasaran yaitu meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61% menjadi 62%

- b. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan sasaran yaitu meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 81% menjadi 82%
- c. Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dengan sasaran yaitu meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21% menjadi 22%
- d. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan sasaran yaitu perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26,8%

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Peningkatkan Kualitas Lingkungan yang diusulkan dalam RKPD ini sebesar Rp 41.361.459.000 bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 17.121.157.000,- APBD Propinsi DIY Rp 6.064.802.000 dan APBN Rp 18.175.500.000,-.

10. Pengurangan Risiko Bencana

Tujuan rencana aksi daerah Pengurangan Risiko Bencana yaitu :

- a. Menjadikan prioritas utama kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana
- c. Mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana
- d. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun manusia dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana
- b. Meningkatkan manajemen penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Program-program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dengan sasaran yaitu meningkatnya respond time dari 150 menit menjadi 120 menit
- b. Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase dengan sasaran yaitu kurangnya genangan air dari 84 titik menjadi 74 titik
- c. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan sasaran yaitu meningkatnya respond time dari 14 menit menjadi 13 menit

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008 dalam Rencana Aksi Daerah Peningkatkan Kualitas Lingkungan yang diusulkan dalam RKPD sebesar Rp 13.827.000.000 bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Rp 6.627.000.000,- APBN Rp 7.000.000.000,- dan Swasta sebesar Rp 200.000.000,-.

BAB III
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

A. KERANGKA EKONOMI MAKRO

1. Perkembangan Ekonomi Daerah Propinsi DIY

Di tengah kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif, pada tahun 2005, perekonomian Propinsi DIY masih mampu tumbuh 4,64 %, meskipun lebih lambat dari laju pertumbuhan tahun 2003 dan 2004 yang masing-masing tercatat 4,58 % dan 5,13 % serta lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,6 % pada tahun 2005. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2000, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tercatat Rp. 16.899 miliar pada tahun 2005, lebih tinggi dari nilai PDRB Tahun lalu yang tercatat sebesar Rp. 16.150 milyar.

Dari sisi kewilayahan, perkembangan ekonomi di wilayah Propinsi DIY didorong oleh pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2000 – 2005
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No.	Kabupaten/ Kota	2000	2001	2002	2003	2004*		2005**	
						Nilai	Ptumb	Nilai	Ptumb
1	Bantul	2.585	2.681	2.801	2.932	3.080	5,04	3.234	4,99
2	Gunungkidul	2.290	2.367	2.444	2.527	2.613	3,43	2.695	3,12
3	Kulon Progo	1.190	1.234	1.285	1.339	1.399	4,52	1.448	3,51
4	Sleman	3.985	4.171	4.374	4.596	4.837	5,25	5.083	5,08
5	Yogyakarta	3.510	3.649	3.812	3.994	4.195	5,05	4.401	4,88

Sumber : BPS Propinsi DIY

Berdasarkan sumbangannya terhadap PDRB DIY, prosentase komposisi kontribusi perekonomian kabupaten/kota secara berurutan adalah Kabupaten Sleman (30%), Kota Yogyakarta (26 %), Kabupaten Bantul (19%) Kabupaten Gunung Kidul (16%) dan Kabupaten Kulon Progo (9 %).

2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah adalah dengan melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang dicerminkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2006 mencapai 4,13 %, walaupun tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 4,88 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh kejadian gempa bumi yang melanda Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 sehingga banyak terjadi kerusakan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang berimbas kepada terganggunya proses produksi masyarakat yang berimbas kepada terganggunya proses produksi barang dan jasa.

PDRB Kota Yogyakarta tahun 2006 bisa mencapai Rp.7.502.445.000.000 dari Rp.6770.089.000.000 yang dihasilkan pada tahun 2005. Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta paling tinggi disumbangkan oleh sektor bangunan, yaitu mencapai 13,28% diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 5,80 %. Sektor pengangkutan dan komunikasi mampu tumbuh 5,20 % dan peran serta sektor perdagangan tumbuh 5,11%

Tabel 2
PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usahan
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2004-2006

No	Tahun	PDRB
1	2004	6.875.890.000.000
2	2005	6.770.089.000.000
3	2006	7.502.445.000.000

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Kontribusi masing – masing sektor dalam pembentukan besaran PDRB pada tahun 2006 mengalami pergeseran. Sektor-sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan PDRB tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2004 – 2006

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2004	2005	2006
1	Pertanian	0.51	0.43	0.39
2	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0,00
3	Industri Pengolahan	11.54	11.09	10.71
4	Listrik, Gas dan air Bersih	1.76	1.79	1.69
5	Bangunan	6.41	6.64	7.26
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.76	23.17	23.26
7	Pengangkutan dan Komunikasi	17.72	17.93	18.15
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	15.38	15.21	14.23
9	Jasa-jasa	23,91	23,74	24,30
	PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan besaran PDRB pada tahun 2006 mengalami pergeseran. Sektor – sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan PDRB tahun 2006 adalah sebagai berikut: Peranan terbesar dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu 24,30% peranan terbesar kedua dicapai oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu 23,26 %, menguat 0,9 % diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi yang dicapai 18,15 % atau menguat 0,22 point dibanding tahun sebelumnya.

Sektor-sektor yang mempunyai peranan cukup besar namun kontribusi terhadap pembentukan besaran PDRB mengalami sedikit melemah adalah sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan melemah dari 15,21% tahun 2005 menjadi 14,23%, diikuti kemudian sektor industri mempunyai peranan mencapai

10,71% atau melemah 0,28 point dibanding tahun sebelumnya. Dilain pihak sektor bangunan peranannya menguat 0,62 point menjadi 7,26 %, sedangkan sektor pertanian, penggalian dan sektor listrik dan air minum peranannya di bawah 2%.

3. Perkembangan PDRB Sisi Permintaan

Investasi merupakan motor penggerak perekonomian Kota Yogyakarta. Hal ini tercermin dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DIY secara kumulatif sampai dengan tahun 2005. Adapun data Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Propinsi DIY menurut Sektor Ekonomi adalah sebagaimana dimaksud pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Propinsi DIY menurut Sektor Ekonomi

No.	Sektor	2003		2004		2005	
		Rencana	realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	82,480	48,317	59,980	27,573	59,980	27,573
2	Pertambangan	1,256	750	1,256	750	1,256	750
3	Industri	875,787	1,162,753	875,787	1,179,023	875,787	1,180,680
4	Konstruksi	13,000	0	13,000	0	13,000	0
5	Perhotelan	753,356	885,756	783,356	885,846	636,256	733,280
6	Pengangkutan	44,869	34,009	44,869	34,737	44,869	34,740
7	Perumahan & Perkantoran	0	0	0	0	0	0
8	Jasa Lainnya	276,549	274,440	196,664	274,788	838,745	274,780
		2,047,297	2,406,025	1,974,912	2,402,717	2,469,893	2,251,817

Sumber : Bappeda Propinsi DIY

Secara prosentase, apabila ditinjau dari aspek sektornya maka pada tahun 2005 sektor industri menduduki pangsa pasar tertinggi yaitu 52,45 %, disusul sektor perhotelan 32,58 %, jasa lainnya 12,21 %, pengangkutan 1,54 %, dan pertanian / kehutanan / perikanan 1,22 %. Penyumbang utama pada sektor industri didominasi industri tekstil 28,10 % dan industri makanan 18,48 %.

Dari tabel 3 sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan penyebaran wilayahnya, baik rencana maupun realisasi PMDN terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dengan nilai masing-masing sebesar Rp.1.063

milyar dan Rp.1.168 milyar. Adapun data tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Propinsi DIY menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	2003		2004		2005	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Bantul	108.757	85.460	108.751	85.400	108.751	85.463
2.	Sleman	1.073.652	1.103.709	1.073.652	1.100.401	974.552	949.498
3.	Gunungkidul	71.894	19.586	71.894	19.586	67.004	19.500
4.	Kulonprogo	255.112	28.559	255.112	28.559	255.112	28.559
5.	Yogyakarta	518.625	1.167.960	416.246	1.167.960	1.063.218	1.167.960
		2.028.040	2.405.274	1.925.655	2.401.906	2.468.637	2.250.980

Sumber : Bappeda Propinsi DIY

Perkembangan investasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 juga dipengaruhi oleh perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA). Dari data persebaran wilayah PMA di Propinsi DIY, Kota Yogyakarta menempati urutan pertama dengan realisasi tertinggi sebesar Rp.1.294 milyar dari rencana sebesar Rp. 1.651 milyar. Adapun data Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) Propinsi DIY menurut Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA)
Propinsi DIY menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	2003		2004		2005	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Bantul	73.782	59.898	78.482	59.898	80.732	59.898
2.	Sleman	591.398	151.976	591.398	151.976	1.230.522	448.986
3.	Gunungkidul	97.329	31.265	97.329	31.265	106.817	40.753
4.	Kulonprogo	0	0	0	0	0	0
5.	Yogyakarta	1.638.891	1.276.131	1.646.281	1.276.131	1.651.167	1.294.038
		2.401.400	1.519.270	2.413.490	1.519.270	3.069.238	1.843.675

Sumber : Bappeda Propinsi DIY

4. Konsumsi

Selama tahun 2005 rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta mencapai Rp. 535.689,- dimana untuk konsumsi makanan selama sebulan mencapai Rp. 199.232,- sedangkan non makanan mencapai Rp. 336.457,-. Rata-rata pengeluaran terbesar terjadi pada sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar Rp.143.974,- atau sebesar 26,88 % dari total pengeluaran.

Komposisi pengeluaran tersebut menggambarkan adanya kondisi tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk yang semakin membaik, dengan asumsi terdapat penurunan prosentase pengeluaran penduduk untuk makanan terhadap total pengeluaran, artinya bahwa semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, maka peranan pengeluaran untuk makanan cenderung makin mengecil atau makin besar pendapatan penduduk maka konsumsi non makanan semakin meningkat. Adapun data Pengeluaran Rata-rata Perkapita Tiap Bulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Yogyakarta Tahun 2005 adalah sebagaimana dimaksud pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Tiap Bulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Yogyakarta Tahun 2005

Golongan Pengeluaran	Makanan (Rp.)	%	Bukan Makanan	%	Total	%
1	2	3	4	5	6	7
< 150.000	69.843	54,72	57.794	45,28	127.638	100,00
150.000 – 499.999	145.901	48,79	153.118	51,21	299.019	100,00
≥ 500.000	295.315	31,30	648.078	68,70	943.393	100,00
Rata-rata Perkapita	199.232	37,19	336.457	62,81	535.689	100,00

Keterangan : Angka Sementara

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2005

B. PERKIRAAN KEUANGAN DAERAH

1. Perkiraan Pendapatan Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan dari Propinsi.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah (kabupaten/kota) dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%), pajak reklame (25%), pajak penerangan jalan (10%), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). Khusus untuk Kota Yogyakarta sesuai dengan spesifikasi daerahnya retribusi galian golongan C tidak dipungut. Adapun data realisasi Pendapatan Daerah tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 sebagaimana pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Pendapatan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2006 dan perkiraan
Tahun 2007

No.	Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007
I	PENDAPATAN	519.154.713.652,64	571.751.665.000
1	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	96.551.932.635,52	100.374.387.000
	a. Pajak Daerah	43.997.150.025,00	48.410.000.000
	b. Restribusi	24.704.782.396,00	28.564.717.000
	c. BUMD	7.722.505.202,62	6.885.000.000
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	20.127.495.011,90	16.513.764.000
2	<i>Dana Perimbangan</i>	397.150.853.946,12	428.318.718.000
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	40.145.140.985,00	36.488.718.000
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	316.832.000.000,00	365.042.000.000
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.800.000.000,00	26.788.000.000
	D Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi	35.373.712.961,12	36.069.791.000
3	<i>Lain-Lain Pendapatan Yang Syah</i>	25.451.927.071,00	43.058.560.000

Sedangkan perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2008 sebagaimana pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Perkiraan Sumber Penerimaan Pembangunan
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008

URAIAN	2008
PENDAPATAN DAERAH	643.366.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.438.000.000
Pajak Daerah	54.227.000.000
Retribusi Daerah	31.997.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.715.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.498.000.000
DANA PERIMBANGAN	471.923.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.204.000.000
Dana Alokasi Umum	400.204.000.000
Dana Alokasi Khusus	30.515.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.006.000.000
Hibah	-
Dana Darurat	-
Dana Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	49.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
Dana Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.006.000.000

2. Perkiraan Belanja Tahun 2008

Adanya perkiraan peningkatan sumber-sumber pendapatan di tahun 2008 diharapkan dapat mengakomodasi berbagai usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Yogyakarta. Namun demikian, tidak semua usulan program dan kegiatan dapat dibiayai mengingat masih adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki, oleh karenanya perkiraan belanja tahun 2008 mendasarkan pada pagu indikatif untuk setiap program sesuai urusan pemerintahan. Adapun perkembangan belanja daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 dan 2006 yang disusun dengan format Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD adalah sebagaimana pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10
Realisasi Belanja APBD Kota Yogyakarta Tahun 2005 dan 2006

URAIAN	TAHUN 2005 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
BELANJA	399.244.605.370	498.044.555.311
APARATUR DAERAH	64.390.925.069	57.709.994.615
1. Belanja Administrasi Umum	28.980.600.331	37.166.581.316
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.844.064.912	17.851.552.629
3. Belanja Modal	14.566.259.826	2.691.860.670
PELAYANAN PUBLIK	334.853.680.300	440.334.560.696
1. Belanja Administrasi Umum	188.968.325.856	237.923.745.569
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	43.301.882.300	55.546.195.918
3. Belanja Modal	55.621.387.991	76.830.418.409
4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keu.	45.118.547.802	60.298.047.321
5. Belanja Tidak Tersangka	1.843.536.350	9.736.153.479

Klasifikasi usulan program kegiatan dan pembiayaan 2007 merupakan usulan pembiayaan pembangunan yang dituangkan dalam format sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dikategorikan sebagai Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun perkiraan belanja tahun 2008 sebagaimana pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11
Perkiraan Belanja APBD Kota Yogyakarta Th 2008

URAIAN	JUMLAH (Rp)
BELANJA	676.793.000.000
Belanja Tidak Langsung	382.707.000.000
Belanja Pegawai	337.000.000.000
Belanja Bunga	707.000.000
Belanja Subsidi	0
Belanja Hibah	0
Belanja Bantuan Sosial	30.000.000.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	0
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	0
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
Belanja Langsung	294.086.000.000
Belanja Pegawai	89.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	110.000.000.000
Belanja Modal	95.086.000.000

Selanjutnya dengan memperhatikan perkiraan pendapatan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada tabel 3 dan perkiraan belanja APBD Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada tabel 4, maka perkiraan sementara RAPBD Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12
Perkiraan RAPBD Th 2008

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	643.366.000.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	112.438.000.000
	Pajak Daerah	54.227.000.000
	Restribusi Daerah	31.997.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Pisahkan	7.715.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah	18.498.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	471.923.000.000
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.204.000.000
	Dana Alokasi Umum	400.204.000.000
	Dana Alokasi Khusus	30.515.000.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59.006.000.000
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya	49.006.000.000
	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	-
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000
2	BELANJA DAERAH	676.793.000.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	382.707.000.000
	Belanja Pegawai	337.000.000.000
	Belanja Bunga	707.000.000
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	-
	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000.000
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	-
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	294.086.000.000
	Belanja Pegawai	89.000.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000.000
	Belanja Modal	95.086.000.000
	Surplus/Defisit	(33.427.000.000)

3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	45.517.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	45.517.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.405.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.446.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	959.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Pembiayaan Netto	34.112.000.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	685.000.000

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD 2008.

Pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap tanggung jawab yang melekat pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2008 merupakan acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta RKPD Tahun 2008 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik berupa kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2008 sebagai berikut :
 - a. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008 berisi Program, Kegiatan dan Indikator Kinerjanya, dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;

- b. Kepala SKPD wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2008 dari masing-masing SKPD, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam perancangan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan aspiratif masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program;
4. Dalam membuat RK-SKPD, Kepala SKPD wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
5. Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap SKPD pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Kepala Unit Kerja/Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator program dan kegiatan tetap dapat tercapai dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2008

1. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Pariwisata 1. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Kepariwisata 2. Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisata 3. Pembinaan Industri Kepariwisata 4. Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Kepariwisata	Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.300.000 menjadi 1.600.000 lama tinggal dari 2 hari menjadi 2,125 hari	300.000 orang dan 0.125 hari	Dinas Pansenbud Dinas Pansenbud Dinas Pansenbud Dinas Pansenbud	4,016,406	500,000	2,000,000		6,516,406
Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya 1. Pelestarian, Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya 2. Festival, Lomba, dan Gelar Seni dan Budaya 3. Pengembangan Organisasi Seni dan Budaya	Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 135 menjadi 158 kekayaan budaya	23 kekayaan budaya	Dinas Pansenbud Dinas Pansenbud Dinas Pansenbud	2,134,776	1,500,000		600,000	4,234,776

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 2. Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Bbudaya	Peningkatan cakupan masyarakat dalam RAPBD dari 83% menjadi 86%	3%	BAPPEDA BAPPEDA	229,110				229,110
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa 1. Pameran Sekaten	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%	1%	B I D	31,190				31,190
Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 1. Peningkatan PJU Kampung 2. Peningkatan PJU Lingkungan 3. Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias	Meningkatnya penerangan jalan umum dari 7000 titik menjadi 9000 titik	2000 titik	Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil	6,500,000				6,500,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Pemb. Pusat Kerajinan & Seni	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD	4,216,275				4,216,275
JUMLAH				17,127,757	2,000,000	2,000,000	600,000	21,727,757

2. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana	Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 15% menjadi 33 %	18%		5,650,000	11,651,700	8,720,000		26,021,700
	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 76% menjadi 82%	6%						
	Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 76% menjadi 82%	6%						
	Meningkatnya standarisasi sarana dan prasarana dari 56% menjadi 62%	6%						
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan			Din.Pendidikan					
2. Akreditasi Sekolah Swasta			Din.Pendidikan					
3. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Din.Pendidikan					
4. SSN SD			Din.Pendidikan					
5. SSN SMP			Din.Pendidikan					
6. School Grand SD			Din.Pendidikan					
7. School Grand SMP			Din.Pendidikan					
8. PKH SMP			Din.Pendidikan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal 1. Pemberian Bantuan Siswa dan Guru Berprestasi 2. Penyelenggaraan Paket B, C 3. Pengelolaan dan Pemberian Bantuan PAUD 4. Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 5. Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris 6. Penerimaan Siswa Baru Online 7. Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran 8. Pameran Pendidikan 9. Ujian Paket B, C 10. Penyelenggaraan Tes Kendali Mutu SMA 11. Pengembangan Minat Baca dan Seni Siswa 12. Pembinaan dan Pengembangan Program Pendidikan Non Formal 13. Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah 14. Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 15. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 16. Pemberian Biaya Operasional Sekolah Negeri	Meningkatnya kualitas pendidikan dari 88% menjadi 91 %	3%	Din.Pendidikan	16,257,090	100,000	23,954,883	1,000,000	41,311,973

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
17. Pertukaran Pelajar			Din.Pendidikan					
18. Pembinaan Karier Pegawai			Din.Pendidikan					
19. Penerbitan Media Komunikasi			Din.Pendidikan					
20. POR Pelajar			Din.Pendidikan					
21. Bimbingan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru TK,SD,SMP,SMA,SMK			Din.Pendidikan					
22. Usaha Kesehatan Sekolah			Din.Pendidikan					
23. Regrouping Sekolah Dasar			Din.Pendidikan					
24. Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD,SMP,SMA,SMK			Din.Pendidikan					
25. Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah			Din.Pendidikan					
26. Pengelolaan Data Pendidikan			Din.Pendidikan					
27. Sosialisasi dan Penguatan Kurikulum Pendidikan Menengah			Din.Pendidikan					
28. Penyelenggaraan Ulangan Umum Semester 2			Din.Pendidikan					
29. Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah			Din.Pendidikan					
30. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Kota Yogyakarta			Din.Pendidikan					
31. Pengembangan Perpustakaan Komunitas			Din.Pendidikan					
32. Retrival SMP			Din.Pendidikan					
33. Bakat Prestasi			Din.Pendidikan					
34. Live Skill			Din.Pendidikan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 1. Penyelenggaraan Penelitian Kependidikan 2. Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan	Diperolehnya baku mutu diatas rata-rata 2% menjadi 4%	2%	Din.Pendidikan Din.Pendidikan	275,000				275,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Rehab bangunan pemerintah fasilitas pendidikan 2. Pemb. UPT Dinas Pendidikan wilayah Selatan dan Timur 3. Pembangunan Taman Pintar 4. Rehab Gedung Sekolah 5. Pengadaan Armada Perpustakaan Keliling Komunitas	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD BPBD BPBD BPBD	5,950,000	4,000,000	11,068,000		21,018,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Wasbang	Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%		Kantor Kesbangpor	750,000	250,000			1,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 1. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Pemuda	Meningkatnya aktifitas Pemuda dari 4% menjadi 8%	4%	Kantor Kesbangpor	416,000				416,000
Program Fasilitas Olah Raga 1. Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga	Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dari 4% menjadi 8%	4%	Kantor Kesbangpor Kantor Kesbangpor	1,500,000			100,000	1,600,000
JUMLAH				30,798,090	16,001,700	43,742,883	1,100,000	91,642,673

3. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perijinan 2. Pengawasan dan Pengaduan Perijinan di Kota Yogyakarta 3. Peningkatan Pelayanan Informasi Perijinan 4. Pelaksanaan koordinasi dan Penelitian Lapangan 5. Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan 6. Penyediaan Cleaining Service untuk Kantor Dinas Perijinan	Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 76% menjadi 82% Ketersediaan regulasi perizinan dari 48% menjadi 56%	6% 8%	Din.Perizinan Din.Perizinan Din.Perizinan Din.Perizinan Din.Perizinan	839,900	400,000			1,239,900
Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UMKMK 1. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi 2. Penyusunan Database UMKMK	Meningkatnya Omzet UMKMK dari Rp 106 M menjadi Rp 112 M	Rp 6 Milyar	Disperindakop Disperindakop	1,598,069		2,682,000	500,000	4,780,069

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
3. Pembinaan Koperasi 4. Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi & BUKP 5. Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi Teknologi Informasi bagi Koperasi Penerima Manfaat			Disperindakop Disperindakop Disperindakop					
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK	Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 63% menjadi 66 %	3%	Disperindakop	100,000				100,000
Program Peningkatan Perdagangan 1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2. Monitoring dan Evaluasi Perdagangan 3. Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS 4. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan 5. Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 69% menjadi 73%	4%	Disperindakop Disperindakop Disperindakop Disperindakop Disperindakop	2,388,140				2,388,140

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 1. Peningkatan 3 UPT (RPH, Kebun Pembibitan, Poliklinik Hewan) 2. Pengelolaan Bursa Argo Jogja dan Pasar Ikan Higienis 3. Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan 4. Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan	Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 109 kelas menjadi 111 kelas terdiri dari : kelas utama yaitu dari 2 kelas menjadi 3 kelas, kelas madya dari 10 kelas menjadi 14 kelas, kelas lanjut dari 27 kelas menjadi 27 kelas, kelas pemula dari 70 kelas menjadi 67 kelas	Kelas Utama 1, Madya 4, Lanjut 0, Pemula (-3)	Kantor Pertanian dan Kehewanan Kantor Pertanian dan Kehewanan Kantor Pertanian dan Kehewanan Kantor Pertanian dan Kehewanan	504,521		5,642,500		6,147,021
Program Pengembangan Pengelolaan Pasar 1. Operasional Peningkatan Pendapatan 2. Pemutakhiran Data Pedagang dan Lahan Dasar 3. Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 4. Peningkatan Kebersihan Pasar	Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 82% menjadi 84%, keamanan dari 87% menjadi 89%, kebersihan dari 30 menjadi 32	2%, 2%, 2	Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar	4,659,100			500,000	5,159,100

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
5. Penertiban, Penyuluhan, dan Penataan Pedagang Pasar 6. Pembuatan Media Promosi 7. Pemeliharaan Pasar-Pasar Tersebar 8. Relokasi Pedagang Ayam Pasar Terban			Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar Din. Pengelolaan Pasar					
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1. Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap K 3	Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 57% menjadi 55%	2%	Disnakertrans Disnakertrans	160,855		355,800		516,655
Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban 1. Penyelenggaraan Pemberantasan PEKAT 2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 3. Operasi & Patroli Ketertiban Umum 4. Pengamanan Khusus	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 86% menjadi 87%	1%	Din. Ketertiban Din. Ketertiban Din. Ketertiban Din. Ketertiban	2,026,151				2,026,151

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Pra FS Aset Daerah	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 80% menjadi 83%	3%	BAPPEDA	134,110				134,110
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian & Pendapatan Daerah 1. Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 74% menjadi 78%	4%	Bag. Perekonomian dan Pendapatan Daerah Bag. Perekonomian dan Pendapatan Daerah	426,075				426,075
Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui daerah 1. Pengadaan Barang 2. Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan 3. Optimalisasi Pajak Parkir 4. Pendataan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran 5. Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran 6. Optimalisasi Pajak Reklame	Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari 2% menjadi 4% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak dari 0,5% menjadi 1%	2% dan 0,5%	KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD KPPD	3,589,931				3,589,931

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
7. Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak			KPPD					
8. Optimalisasi PBB dan BPHTB			KPPD					
9. Optimalisasi Pajak Hiburan			KPPD					
JUMLAH				16,426,852	400,000	8,680,300	1,000,000	26,507,152

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Kelompok	Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 42% menjadi 47%	5%	Din. Kesehatan	9,331,448				9,331,448
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih 5.03% menjadi 6,53%	1.5%	Disnakertrans Disnakertrans	1,125,142		732,470		1,857,612
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2. Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 3. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Menurunnya jumlah penganggur dari 6,08% menjadi 6%	0.08%	Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans	551,000		941,762		1,492,762

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutamaan Gender 1. Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan 2. Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak menjadi 44% menjadi 48%	4%	Bag. Kesmas dan PUG Bag. Kesmas dan PUG	1,250,881				1,250,881
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2. Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos 3. Kerjasama antar FKPSM 4. Bantuan Operasional FKPSM 5. Bimbingan Pengurus Orsos	Meningkatnya PSKS sebesar 2%	2%	Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos	713,837	250,000	290,000		1,253,837
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pendataan PMKS dan PSKS 2. Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 3. Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 4. Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar	Menurunnya PMKS sebesar 2%	2%	Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos Dinas Kesos	5,731,739	2,603,000	3,102,150		11,436,889

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
5. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial			Dinas Kesos					
6. Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Dinas Kesos					
7. Santunan Kematian Pemegang KTP di Yogyakarta			Dinas Kesos					
8. Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma			Dinas Kesos					
9. Peningkatan Pelayanan PMKS			Dinas Kesos					
10. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi KK Miskin			Dinas Kesos					
11. Penumbuhan USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi			Dinas Kesos					
12. Bimbingan Pementapan Pengembangan KUBE Keluarga Fakir Miskin			Dinas Kesos					
13. Perbaikan Rumah Keluarga Tidak Layak Huni			Dinas Kesos					
14. Bantuan Makan Kepada LU terlantar			Dinas Kesos					
15. Bimbingan dan Bantuan UEP bagi LU terlantar			Dinas Kesos					
16. Bantuan Tambahan Makanan bagi Anak Cacat			Dinas Kesos					
17. Pelatihan Ketrampilan dan PBK bagi Anak Terlantar			Dinas Kesos					
18. Pembinaan dan Penyantunan AT Keluarga Tidak Mampu, Yatim, Piatu dan Yatim Piatu			Dinas Kesos					
19. Revitalisasi paca			Dinas Kesos					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
20. Bimbingan UEP Eks Penyakit Kronis			Dinas Kesos					
21. Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri Paca			Dinas Kesos					
22. Bimbingan Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Jiwa			Dinas Kesos					
23. Pelayanan dan Rehab Korban NAPZA Luar Panti			Dinas Kesos					
Program Fasilitas dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 56% menjadi 62%	6%		542,500				542,500
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan			Bag. Kesmas dan PUG					
2. Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan			Bag. Kesmas dan PUG					
Program Keluarga Berencana	Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 15 menjadi 14	1 CBR	BKKBC	570,528		528,475		1,099,003
1. Peningkatan KB - KS			BKKBC	570,528				

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK 1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 2. Pendampingan Industri Mikro dan Kecil 3. Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah 4. Bimbingan Penerapan Teknologi Produksi	Meningkatnya omset UMKMK dari Rp 106 M menjadi Rp 112 M	Rp 6 Milyar	Disperindakop Disperindakop Disperindakop Disperindakop	2,406,620				2,406,620
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Pembangunan Pagar Bangunan panti Wreda dan Panti Asuhan 2. Pemb. Pasar Talok 3. Rehabilitasi Gedung Panti Karya	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD BPBD BPBD	1,500,000	1,000,000	1,000,000		3,500,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program pengelolaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman, pemeliharaan dan pengembangan perumahan dan permukiman 1. Counterpart Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Non Perpipaan 2. Counterpart Pengembangan/ Pelaksanaan Perumahan Sederhana	Ningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dari 10% menjadi 12,% dan jumlah rumah layak huni meningkat dari 90% menjadi 92 %	2%	Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil	1,600,000				1,600,000
JUMLAH				41,437,695	5,308,181	8,634,439	100,000	55,480,314

5. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 72% menjadi 74%	2%		4,377,977	677,455	2,973,618		8,029,051
1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan			Din.Kesehatan					
2. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS			Din.Kesehatan					
3. Pengolahan Data Surveillance Gizi			Din.Kesehatan					
4. Pembahasan Juknis gizi di Kab/Kota			Din.Kesehatan					
5. Peningkatan Kemampuan Kader Posyandu di Kelurahan			Din.Kesehatan					
6. Pertemuan Evaluasi Pilot Project Kadarzi Tk. Kecamatan			Din.Kesehatan					
7. Pertemuan Evaluasi Pilot Project Kadarzi Tk. Kelurahan			Din.Kesehatan					
8. Monitoring Program PMTAS			Din.Kesehatan					
9. Advokasi Konsumsi Garam Beryodium di Kecamatan			Din.Kesehatan					
10. Rakor Forum PMTAS di Kab/Kota			Din.Kesehatan					
11. Pemberian PMT pada Bumil KEK dan PMT Penyuluhan di Posyandu			Din.Kesehatan					
12. Operasional Kegiatan MP/ASI			Din.Kesehatan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
13. Pertemuan Pembahasan Situasi Masalah Gizi di Kab/Kota			Din.Kesehatan					
14. Pelacakan Gizi Buruk			Din.Kesehatan					
15. Monitoring Distribusi Obat			Din.Kesehatan					
16. Pengadaan Bahan Makanan Tambahan Pengganti ASI, Bahan Gizi dan sejenisnya			Din.Kesehatan					
17. Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi			Din.Kesehatan					
18. Pengadaan Ambulan PMI			Din.Kesehatan					
19. Pengadaan Alat UTD dan Pemeriksaan Laboratorium			Din.Kesehatan					
20. Penyusunan/ Pengolahan/ Updating Data Statistik			Din.Kesehatan					
21. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Reproduksi Remaja			Din.Kesehatan					
22. Peningkatan Kinerja Yan KB bagi Puskesmas			Din.Kesehatan					
23. Penyusunan Rencana Program Kesehatan Ibu			Din.Kesehatan					
24. Pengembangan PKtP Terpadu di Puskesmas			Din.Kesehatan					
25. Sosialisasi Kemitraan Bidan Dukun di Puskesmas			Din.Kesehatan					
26. Sosialisasi Kemitraan Bidan Dukun di Kota			Din.Kesehatan					
27. Sosialisasi Pemetaan Sasaran Bumil & Kantong Persalinan			Din.Kesehatan					
28. Sosialisasi dan Fasilitasi SPK di Puskesmas			Din.Kesehatan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
29. Sosialisasi Program Kes ibu dan BBL			Din.Kesehatan					
30. Reorientasi Program KIA KB bagi Kader di Kota			Din.Kesehatan					
31. Pelayanan Kesehatan Ibu / Voucher			Din.Kesehatan					
32. Koordinasi Pelaksanaan Voucher KIA			Din.Kesehatan					
33. Bantuan Operasional Voucher untuk Desa			Din.Kesehatan					
34. Penjaringan Deteksi Resiko/Faktor Resiko Bumil			Din.Kesehatan					
35. Pembinaan Penjaringan Risti oleh Dokter Spesialis			Din.Kesehatan					
36. Peningkatan Kemampuan Fasilitator Desa Siap Antar Jaga			Din.Kesehatan					
37. Sosialisasi Pembentukan Desa Siap Antar Jaga untuk Kota			Din.Kesehatan					
38. Pelaksanaan Desa Siap Antar Jaga (Desa Siaga) di Kota			Din.Kesehatan					
39. Stimulan untuk Desa Siaga di Kota			Din.Kesehatan					
40. Evaluasi Pelaksanaan AMP			Din.Kesehatan					
41. Fasilitasi Pendataan Sasaran Bumil oleh Bidan (Kantong Persalinan)			Din.Kesehatan					
42. Supervisi Manajemen Kes. Ibu di Kota			Din.Kesehatan					
43. Pengiriman Peserta Pelatihan TOT Konseling Remaja			Din.Kesehatan					
44. Pelatihan SDIDTK Anak			Din.Kesehatan					
45. Pengiriman Peserta Pelatihan MTBS			Din.Kesehatan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
46. Pengiriman Peserta Pelatihan Manajemen Asphixia			Din.Kesehatan					
47. Pengiriman Pelatihan Manajemen BBLR			Din.Kesehatan					
48. Penyusunan Perencanaan Program Kes Anak Tahun 2007			Din.Kesehatan					
49. Penyusunan Perencanaan Program Kes Anak Tahun 2008			Din.Kesehatan					
50. Koordinasi Perencanaan Keg. PKPR			Din.Kesehatan					
51. Bantuan Operasional Puskesmas Peduli Remaja			Din.Kesehatan					
52. Sosialisasi Buku KIA Lintas Program/Lintas Sektor			Din.Kesehatan					
53. Sosialisasi KTA Lintas Program/Lintas Sektor			Din.Kesehatan					
54. Sosialisasi Pedoman Pemberian Vitamin K di Kota			Din.Kesehatan					
55. Sosialisasi SDIDTK Anak bagi Guru TK di Kota			Din.Kesehatan					
56. Sosialisasi Pelatihan Buku KIA bagi Kader di Kota			Din.Kesehatan					
57. Penyeliaan Program Kesehatan Anak, Bayi dan Balita			Din.Kesehatan					
58. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita			Din.Kesehatan					
59. Pelayanan Kesehatan Anak SD			Din.Kesehatan					
60. Pelayanan Kesehatan Anak SMP			Din.Kesehatan					
61. Pelayanan Kesehatan Anak SMA			Din.Kesehatan					
62. Monitoring Evaluasi Program Kes Bayi Balita Apras di Kota			Din.Kesehatan					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
63. Koordinasi, Monev UKS di Kota 64. Lomba Sekolah Sehat di Kota (4 Sekolah) 65. Pelaksanaan Audit Kematian Bayi Balita 66. Monev Program Kesehatan Remaja 67. Review Penanggulangan KTA 68. Review Audit Kematian Balita			Din.Kesehatan Din.Kesehatan Din.Kesehatan Din.Kesehatan Din.Kesehatan Din.Kesehatan					
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 1. Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Perilaku hidup sehat bagi Individu, kelompok dan masyarakat dari 41% menjadi 47%	6%	Din.Kesehatan	1,592,301	500,000			2,092,301
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 2. Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 3. Pengendalian Penyakit Zoonosa	Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah	6%	Din.Kesehatan Din.Kesehatan Kantor Pertanian dan Kehewanan	2,354,147				2,354,147

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	Meningkatnya Indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,72 menjadi 0,74	0.02		21,358,755		9,329,711		30,688,466
1. Pelayanan Administrasi			RSUD					
2. Pengelolaan Obat dan Reagen			Din.Kesehatan					
3. Pengelolaan Operasional Puskesmas			Din.Kesehatan					
4. Pengelolaan Perbekalan Kesehatan			Din.Kesehatan					
5. Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			Din.Kesehatan					
6. Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin			RSUD					
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			RSUD					
8. Pelayanan Penunjang Medis			RSUD					
9. Pelayanan Penunjang Non Medis			RSUD					
10. Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien			RSUD					
11. Pelayanan Administrasi Pasien			RSUD					
12. Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan			RSUD					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program regulasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan 1. Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Institusi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standart dan mutu 48% menjadi 56%	8%	Din.Kesehatan Din.Kesehatan	942,991				942,991
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Pembangunan Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan 2. Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan 4. Pembangunan Gedung Gudang Farmasi (lanjutan rehab gedung TA. 2007) 5. Pembangunan Gedung Pustu (Tegalmulyo dan Tompeyan)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD BPBD BPBD BPBD	5,950,000		1,750,000		7,700,000
Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan 1. Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan	Peningkatan standar sanitasi higienis unit usaha dari 38 unit menjadi 44 unit	8 unit	Kantor Pertanian dan Kehewananan	88,819		3,000,000		3,088,819
JUMLAH				36,664,990	1,177,455	17,053,329	-	54,895,775

6. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
<p>Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah</p> <p>1. Pengkajian Peraturan Daerah</p> <p>2. Pengolahan Data Hukum</p>	Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 79% menjadi 83%	4%	Bag. Hukum Bag. Hukum	520,000				520,000
<p>Program Peningkatan Pelayanan Hukum</p> <p>1. Penyuluhan Hukum</p> <p>2. Publikasi RPD ke Media Cetak</p> <p>3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah</p> <p>4. Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemkot Yogyakarta</p> <p>5. Pembuatan dan Penerbitan LD dan Pengembangan JDI-H</p> <p>6. Pembinaan Kesadaran Hukum di Kota Yogyakarta</p> <p>7. Pelaksanaan RANHAM di Kota Yogyakarta</p>	<p>Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 80% menjadi 85%</p> <p>Penerapan nilai-nilai HAM dan Penyampaian informasi Produk hukum dari 84%menjadi 88%</p>	5% 4%	Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum Bag. Hukum	1,200,680				1,200,680

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1. Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	Meningkatnya penenganan pelanggaran perda dari 86 % menjadi 87%	1%	Dinas Ketertiban	406,520				406,520
Program Peningkatan Kehidupan Beragama 1. Fasilitas Peningkatan Kehidupan Keagamaan dan Kemasyarakatan	Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama	2%	Bag.Kesmas & PUG Bag.Kesmas & PUG	2,550,000				2,550,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1. Pemeriksaan Khusus 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi 3. Review Laporan Keuangan SKPD 4. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5. Evaluasi Lakip 6. Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Pemeriksaan Reguler	Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 9% menjadi 8%	1%	Bawasda Bawasda Bawasda Bawasda Bawasda Bawasda	852,734				852,734

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program					
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)					
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 1. Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi 3. Pengkajian Kelembagaan Perangkat Daerah 4. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 5. Penyusunan Standar Norma Waktu Kerja 6. Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 83 menjadi 86	3	Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi	756,211					756,211
JUMLAH				6,286,145	-	-	-	6,286,145	

7. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	SKPD Kota Yogyakarta	44,000,000				44,000,000
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 1. Pemberian Kesejahteraan Pegawai 2. Penilaian Angka Kredit 3. Rekrutmen Pegawai 4. Fasilitas Administrasi Kepegawaian 5. Fasilitas Kegiatan Baperjakat 6. Identifikasi Kebutuhan Sumber daya Pegawai sesuai Kebutuhan 7. Penilaian Kinerja pegawai 8. Kajian Kualitas SDM 9. Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 72% menjadi 74%	2%	BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD	1,535,782				1,535,782

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
10. Pengelolaan data Pegawai Tidak Tetap			BKD					
11. Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan Penyelesaian Hukuman Disiplin			BKD					
12. Tes Kesehatan PNS			BKD					
Program Fasilitas Penyelenggaraan PILKADA/ PEMILU	Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40%	40%		6,652,390		7,000,734		13,653,124
1. Kajian Politik, Hukum dan Demokrasi			Sek. KPU					
2. Dinamisasi Politik Lokal			Sek. KPU					
3. Fasilitas Penyusunan Daerah Pemilihan			Sek. KPU					
4. Sosialisasi Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilu 2009			Sek. KPU					
5. Pemutakhiran Data Pemilih dan Database Pemilih untuk Pemilu			Sek. KPU					
6. Seleksi Anggota KPU Kota Yogyakarta Periode 2008-2013			Sek. KPU					
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu			Sek. KPU					
8. Penyusunan Daftar Wilayah, Badan Penyelenggara, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih untuk Pemilu 2009			Sek. KPU					
9. Pengadaan Sarana Komunikasi Pemilu			Sek. KPU					
10. Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi			Sek. KPU					
11. Penyediaan Biaya Rutin dan Perangkat Kerja Penyelenggara Pemilu			Sek. KPU					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
12. Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu 2009			Sek. KPU					
13. Pengolahan Data Informasi			Sek. KPU					
14. Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi			Sek. KPU					
15. Sortifikasi / Distribusi Barang keperluan Pemilu Anggota DPRD Kota dan Lain-Lain			Sek. KPU					
16. Pembangunan Gudang			Sek. KPU					
17. Validasi Nama-Nama Calon Anggota DPRD Kota Yogyakarta			Sek. KPU					
18. Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Anggota DPRD Kota dan Lain-Lain			Sek. KPU					
19. Penyusunan Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilu			Sek. KPU					
20. Penguatan Kelembagaan Demokrasi Non Pemerintah di Bidang Pemilu dan Pilkada			Sek. KPU					
21. Pendidikan Pemilih			Sek. KPU					
22. PAW Anggota DPRD Kota Yogyakarta			Sek. KPU					
23. Penerbitan Majalah/Jurnal dan Informasi Aktual			Sek. KPU					
24. Simulasi Penyelenggaraan Pemilu			Sek. KPU					
25. Peliputan dan Dokumentasi Pilkada dan Pemilu			Sek. KPU					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan Kualitas Pol PP 2. Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 3. Pembinaan PPNS 4. Penyelenggaraan Diklat 5. Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar bagi PNS Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 74% menjadi 78%	4%	Din. Ketertiban Din. Ketertiban Din. Ketertiban BKD BKD	4,660,987		200,000		4,860,987
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah 1. Penyusunan Naskah Sambutan 2. Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah 3. Penyelenggaraan Bimtek Keprotokolan bagi Pejabat 4. Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Seremonial Lainnya	Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolandari 81% menjadi 85%	4%	Bag. Protokol Bag. Protokol Bag. Protokol Bag. Protokol	442,000				442,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah 1. Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana, DKB/DKPB,RKBU/RKPBU 2. Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk. 3. Penghapusan Barang Daerah Kota Yk. 4. Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Yk. Tahun 2008 5. Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Barang 6. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 7. Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah 8. Pembuatan Leger Bangunan Gedung Pemkot Yk. 9. Pengadaan SIMBADA Kota Yk 10. Pembangunan Gudang Pengaman Barang Daerah Kota Yk. 11. Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah 12. Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 83% menjadi 86%	3%		3,234,335				3,234,335
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					
			BPBD					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Rehab Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Perkantoran 2. Pembangunan Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Perkantoran 3. Rehab Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Umum 4. Pembangunan Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Umum 5. Rehab Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Ekonomi 6. Pembangunan Bangunan Pemerintah untuk Fasilitas Ekonomi 7. Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemkot Yk 8. Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 9. Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD	16,786,015				16,786,015
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan 1. Perbaikan Mebelair dan Mesin/Alat Kantor Pemkot Yk.	Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 83% menjadi 86%	3%	BPBD	680,686				680,686

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%	1%		4,573,500	3,000,000		500,000	8,073,500
1. Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)			BID					
2. Pengadaan Perangkat Keras Komputer, Perangkat jaringan, Teknologi Informasi dan Komunikasi			BID					
3. Penyusunan Media Publikasi			BID					
4. Pelayanan Informasi Program Kota melalui berbagai Media			BID					
6. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government			BID					
7. Pembinaan Pengembangan IT			BID					
8. Sosialisasi Dasar Hukum, Petunjuk Pelaksanaan Teknis, Master Plan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas kepada Masyarakat dan Aparatur			BID					
9. Pembangunan Sistem Informasi dan Aplikasi Teknologi Informasi			BID					
10. Pengelolaan Bengkel Komputer			BID					
11. Penerbitan Majalah Ayodya			BID					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Kerjasama Daerah 1. Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah 2. Pengembangan Kerjasama Antar Pemerintah	Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 72% menjadi 74%	2%	Bag.Kerjasama Bag.Kerjasama	816,323				816,323
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 1. Kajian Peningkatan Peran Kehumasan Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 86% menjadi 87%	1%	BID	32,835				32,835
Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 1. Pengembangan Kearsipan 2. Pengelolaan Arsip Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 81% menjadi 82%	1%	BID BID	266,000				266,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Data dan Informasi 1. Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 83 menjadi 85%	2%	BAPPEDA	194,248				194,248
Program Peningkatan Pelayanan ke Rumah Tanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot 1. Fasilitasi Pertemuan-pertemuan 2. Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 83%menjadi 86%	3%	Bag. Umum Bag. Umum	442,359				442,359
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pelayanan Catatan Sipil 2. Pembuatan Buku Register dan Akta Catatan Sipil	Meningkatnya Database kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari 67% menjadi 75%	8%	BKKBC BKKBC	1,246,146				1,246,146

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan			BKKBC					
4. Pembuatan KTP/KIA dan KK di Kota Yogyakarta			BKKBC					
Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 62% menjadi 64%	2%		6,096,444				6,096,444
1. Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan			Kec. Se-Kota Yk					
2. Penyebarluasan Informasi			Kec. Se-Kota Yk					
Program Peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan , evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 82% menjadi 84%	2%		1,166,206		3,044,920		4,211,126
1. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah			Bag. Tapem					
2. Penyusunan LPPD, Lakip dan RKT			Bag. Tapem					
3. Penyusunan LJKP 2007 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta			Bag. Tapem					
4. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan			Bag. Tapem					
5. Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan			Bag. Tapem					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
6. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Serta Penyusunan Data Profil Kelurahan			Bag. Tapem					
7. Peningkatan Koordinasi Pemerintah dan Fasilitasi Rapat Muspida			Bag. Tapem					
Program Peningkatan Layanan pada DPRD	Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 83% menjadi 86%	3%		6,271,026				6,271,026
1. Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon APBD 2008			Sek. DPRD					
2. Penjaringan Aspirasi Masyarakat			Sek. DPRD					
3. Pembahasan RAPBD 2008			Sek. DPRD					
4. Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD			Sek. DPRD					
5. Penetapan Perda-Perda			Sek. DPRD					
6. Publikasi Kegiatan DPRD			Sek. DPRD					
7. Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik			Sek. DPRD					
8. Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD serta Penyedia Jasa Cleaning Service			Sek. DPRD					
9. Pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD			Sek. DPRD					
10. Asuransi Kesehatan DPRD			Sek. DPRD					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 1. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 64%menjadi 68%	4%	Bag. Tapem	1,607,181				1,607,181
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pelayanan dan Sarana Prasana	Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 83%menjadi 86%	3%	BAPPEDA BAPPEDA	441,770				441,770
Program Penelitian dan Pengembangan 1. Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 82%menjadi 84%	2%	BAPPEDA	304,540				304,540
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1. Pengendalian Kegiatan 2. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Meningkatnya kesesuaian SOP/ standart pelaksanaan kegiatan dari 83%menjadi 86%	3%	Bag. Dalbang Bag. Dalbang	787,176				787,176

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
3. Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			Bag. Dalbang					
4. Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			BAPPEDA					
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 86% menjadi 87%	1%		2,458,357				2,458,357
1. Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa			BPKD					
2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD			BPKD					
3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah			BPKD					
4. Implementasi dan Kostumisasi Sistem Informasi Pengelolaan			BPKD					
5. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah			BPKD					
6. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD			BPKD					
7. Manajemen Pelaksanaan Anggaran			BPKD					
8. Pengelolaan Dana Perimbangan			BPKD					
9. Pengendalian Anggaran Belanja Daerah			BPKD					
10. Pengelolaan Investasi Dana Daerah			BPKD					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
11. Pengelolaan Anggaran Bantuan			BPKD					
12. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			BPKD					
13. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			BPKD					
14. Penyusunan Profil Keuangan Daerah			BPKD					
JUMLAH				104,696,304	3,000,000	10,245,654	500,000	118,441,958

8. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
<p>Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan</p> <p>1. Pemantauan Tata Ruang dan Tata Bangunan</p> <p>2. Penyusunan Rencana Rinci dan Detail Kawasan</p> <p>3. Penyusunan Zoning Regulation Kawasan</p> <p>4. Penyusunan dan Pengembangan Database Tata Ruang dan Tata Bangunan</p>	Meningkatnya Produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 33% menjadi 50%	17%	Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil	650,000	600,000			1,250,000
<p>Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>1. Peningkatan Jalan (DAK)</p> <p>2. Pemeliharaan/Peningk Jalan dan Jembatan</p> <p>3. Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan (BPPJ)</p> <p>4. Normalisasi Simpang</p> <p>5. Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan</p> <p>6. Peningkatan jalan propinsi</p>	Meningkatnya Penanganan jalan dan jembatan Rusak dari 5% menjadi 9%	4%	Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil	12,140,594		58,881,096		71,021,690

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalin dan Marka Jalan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB	Meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 66% menjadi 72%	6%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	217,000			100,000	317,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Penyusunan Sistem Informasi Angkutan 2. Perencanaan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang 3. Optimalisasi Perijinan Angkutan 4. Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelancaran arus lalulintas dari 66% menjadi 72%	6%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	368,088				368,088

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan pengaturan Lalu Lintas 1. Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 2. Survei Bidang Lalu Lintas (Volume Lalin, Kecepatan Lalin, Perlengkapan Jalan dan Survei Asal Tujuan/OD) 3. Operasional dan Optimalisasi Penyeleng Perparkiran 4. Pengadaan Penyedia Jasa TKP 5. Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dgn Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatkannya Ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 66% menjadi 72%	6%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	758,330				758,330
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1. Penataan Prasarana Dasar Permukiman 2. Pemeliharaan TPU 3. Rehabilitasi Talud 4. Peningkatan Bronjong	Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman 10% menjadi 12% dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 90% menjadi 92%	2% dan 2%	Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil Din. Kimpraswil	2,202,000	1,236,000			3,438,000

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar dan Rambu RPPJ 2. Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 66% menjadi 72%	6%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan	564,000	12,000,000		500,000	13,064,000
JUMLAH				16,900,012	13,836,000	58,881,096	600,000	90,217,108

9. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1. Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Restribusi Lingkungan 2. Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan dan SAL 3. Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran LH 4. Prokasih GKS 7. Program Langit Biru (PROLABIR) 8. Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan 9. Penyusunan Profil Lingkungan Hidup 10. Pemantauan Kualitas Lingkungan 11. Pembuatan Sumur Pantau dan Alat Pantau Air dan Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara	Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlakudar 61% menjadi 62%	1%		2,748,369	1,100,000			3,848,369
			DLH					
			DLH					
			DLH					
			DLH					
			DLH					
			DLH					
			DLH					
			DLH					

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Pembersihan sampah 2. Pengangkutan sampah 3. Pemeliharaan dan peningkatan sarpras SAL 4. Pengadaan sarana dan Prasarana Kebersihan SAL 5. Pengadaan Tong Sampah dan Gerobak Sampah 6. Pembuatan Depo Sampah 7. Percontohan Pemilahan Sampah	Meningkatkannya Cakupan layanan persampahan dari 81% menjadi 82%	1%	DLH DLH DLH DLH DLH DLH DLH	8,292,799	535,552	9,175,500		18,003,851
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 1. Sanitasi Berbasis Masyarakat 2. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL 3. Rehab/Pembuatan MCK 4. Pembuatan SPAH 5. Pembuatan IPAL Komunal	Meningkatkannya Cakupan layanan air limbah dari 21% menjadi 22%	1%	DLH DLH DLH DLH DLH	2,450,000	4,329,250	6,700,000		13,479,250

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatkanya perbandingan RTH dengan luas wilayah	26.8%		3,629,988	100,000	2,300,000		6,029,988
1. Perbengkelan			DLH					
2. Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota/Pemeliharaan Taman Kota			DLH					
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau			DLH					
4. Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			DLH					
5. Penghijauan			DLH					
JUMLAH				17,121,157	6,064,802	18,175,500	-	41,361,459

10. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Target Program	SKPD	Pagu Indikatif / Program				
				SUMBER DANA (Ribuan Rp)				
				APBD KOTA	APBD PROP	APBN	SWASTA	JUMLAH
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 1. Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 2. Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan respon time dari 150 menit menjadi 120 menit	30 menit	Kantor Linmas dan PK Kantor Linmas dan PK	1,012,000			200,000	1,212,000
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1. Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 2. Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan respon time dari 14 menit menjadi 13 menit	1 menit	Kantor Linmas dan PK Kantor Linmas dan PK	985,000				985,000
Program Perbaikan / Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 1. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH 2. Perbaikan Talud 3. Peningkatan Saluran 4. Pembuatan Akses Alat Berat ke Sungai 5. Penanganan Sungai 6. Pemeliharaan Bangunan Pengairan	Kurangnya genangan air dari 84 titik menjadi 74 titik	10 titik	Din.Kimpraswil Din.Kimpraswil Din.Kimpraswil Din.Kimpraswil Din.Kimpraswil Din.Kimpraswil	4,630,000		7,000,000		11,630,000
JUMLAH				6,627,000	-	7,000,000	200,000	13,827,000
TOTAL				294,086,000	47,788,138	174,413,201	4,100,000	520,387,339

BAB VI PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2008. Selanjutnya Walikota dan penyelenggara Pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2008.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2008 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Yogyakarta, 31 Mei 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO